

## ETNOREFLIKA

VOLUME 5

No. 3. Oktober 2016

Halaman 246 - 257

**KESIAPAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA  
BERBASIS BUDAYA LOKAL DI SULAWESI TENGGARA<sup>1</sup>***La Ode Aris<sup>2</sup>***ABSTRAK**

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul Model Pengembangan Destinasi Pariwisata berbasis Budaya lokal Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengambil lokasi di tiga (3) daerah yaitu Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Wakatobi. Dalam tulisan ini terfokus pada kesiapan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal di Sulawesi Tenggara. Artikel ini mendeskripsikan mengenai kesiapan *stakeholders* dalam pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis budaya lokal. Selama ini, pariwisata yang ada hanya mengandalkan keunikan dan keindahan tempat wisata itu sendiri tanpa ada upaya membuat rekayasa budaya yaitu menyandingkan budaya lokal dengan pariwisata. Dengan demikian para wisatawan bukan hanya berkunjung menikmati keindahan alam tempat wisata tersebut tetapi sekaligus dapat menikmati dan menyaksikan atraksi seni dan budaya yang merupakan aset dari daerah tempat wisata tersebut berada. Peneliti ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode pengamatan (*observation*) dan metode wawancara (*interview*), sementara analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan kesiapan berbagai pihak yaitu kesiapan para seniman, kesiapan dinas pariwisata, Ketersediaan infrastruktur jalan utamanya di pelosok-pelosok desa dan kesiapan dari masyarakat setempat dalam menerima wisatawan.

**Kata kunci:** kesiapan, *stakeholders*, pengembangan, pariwisata, dan budaya lokal

**ABSTRACT**

*This article is part of a research entitled Tourism Development Model Based on Local Culture of Southeast Sulawesi Province which takes place in three (3) regions of Muna Regency, Konawe District and Wakatobi Regency. This paper focuses on the readiness of stakeholders in the development of local culture-based tourism in Southeast Sulawesi. This article describes the readiness of stakeholders in the development of tourism destinations based on local culture. During this time, the existing tourism only rely on the uniqueness and beauty of the resort itself without any attempt to create a cultural engineering that juxtaposing local culture with tourism. Thus the tourists are not just visiting enjoy the natural beauty of the resort but at the same time can enjoy and witness the art and cultural attractions that are the assets of the area where the tour is located. This research is qualitative. Methods of data collection in this study are observation method and interview method, while data analysis using qualitative data analysis. The results of this study show the readiness of various parties, namely the readiness of the artists, the readiness of the tourism office, the availability of infrastructure of the main roads in remote villages and the readiness of the local community in accepting tourists.*

**Keywords:** readiness, stakeholders, development, tourism, local culture

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian

<sup>2</sup> Dosen pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laodearis@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang menjadi andalan bangsa Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara adalah sektor pariwisata. Sektor ini dapat mendatangkan devisa yang besar. Dengan adanya cadangan devisa yang besar, maka peluang untuk membiayai pembangunan juga besar. Sebaliknya apabila cadangan devisa menipis maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan. Menurut Wahab (1975: 9), pariwisata adalah salah satu industri yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.

Dari sekian banyak pariwisata yang menjadi andalan berbagai daerah di Indonesia adalah wisata pantai. Pariwisata seperti ini hanya menyuguhkan keindahan pantai kepada para wisatawan, sehingga para wisatawan hanya menikmati keindahan pantai tanpa disuguhkan hal yang berbeda yang membuat mereka betah dan berlama-lama di tempat tersebut.

Pariwisata berbasis budaya merupakan project baru dalam dunia pariwisata. Kehadirannya belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Konsep pariwisata budaya ini hadir dapat dikemas sendiri atau dapat dipadukan dua atau lebih jenis pariwisata yang dihadirkan dalam satu arena, sehingga kehadirannya nampak menarik dan mengundang daya tarik wisatawan. Resolusi yang diambil oleh Kongres Pariwisata Antar Amerika (*Inter American Travel Congress*) pada sidang tahunannya yang kelima di Panama pada Tahun 1945 yang menyatakan bahwa wisata budaya dan kebudayaan dalam dunia kepariwisataan adalah merupakan unsur utama dan memegang peranan sangat penting (Pandit 2006: 194).

Sulawesi Tenggara menyimpan beragam budaya lokal yang dapat dikembangkan, sehingga dapat mendorong bergairahnya sektor pariwisata. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka budaya-budaya lokal

akan hilang dan tergerus oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan budaya-budaya lokal tersebut agar dapat terpelihara dan dapat diwariskan dari generasi-kegenerasi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan dua Teknik *observation* atau pengamatan dan *interview* atau wawancara. Peneliti juga turut langsung bersama obyek dalam kegiatan seni. Teknik ini disebut sebagai teknik observasi partisipasi (*participant observation*) (Vredenburg 1978: 68-59). Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball* yang diterapkan oleh Spradley (1997:61) dan Benard (1994:61). Informan penelitian terdiri dari dua kategori yaitu informan kunci dan informan biasa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif etnografis (Endraswara 2003: 242). Melalui teknik ini dapat diperoleh gambaran dan deskripsi mendalam tentang kesiapan *stakeholders* dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya di Sulawesi Tenggara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara memerlukan kesiapan dan keterlibatan berbagai stakeholder di daerah ini, antara lain: kesiapan seniman dan lembaga seni, Dinas Pariwisata, kesiapan penunjang penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya, kesiapan masyarakat setempat dalam menerima wisatawan, lembaga keuangan dan kesiapan perhotelan.

### 1. Kesiapan Seniman

Ketika ditanya mengenai kesiapan seniman di Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan pariwisata budaya di daerah ini, maka tentu saja jawaban mereka adalah siap. Namun demikian selama ini, mereka merasa kurang didukung oleh

pemerintah untuk mengembangkan seni budaya di daerah ini. Sementara itu, untuk menunjang karya para seniman, juga membutuhkan pendanaan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, beberapa kondisi faktual yang melingkupi upaya seniman mengembangkan karya seni budaya, antara lain:

a. Seniman mendapat perhatian, hanya jika akan diselenggarakan even pertunjukan seni budaya. Dalam bahasa yang diungkapkan oleh informan bahwa seniman di daerah ini, kadang dibutuhkan, kadang pula tidak. Mereka dibutuhkan hanya saat ada even pertunjukan saja. Kondisi tersebut, tampak di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe.

Di beberapa wilayah kabupaten tersebut, ketika ada even atau pertunjukan para seniman dan sanggar seninya mendapatkan anggaran untuk menggelar latihan intensif untuk menyopkong kegiatan pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan atau pertunjukan tersebut selesai, maka sokongan anggaran pun berhenti. Seniman dan pengelola sanggar seni terpaksa harus berusaha sendiri melakukan berbagai cara agar sanggar seni mereka tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap keberadaan seniman dan sanggar seni di wilayah Sulawesi Tenggara.

b. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Wakatobi lebih banyak diarahkan pada pariwisata pantai/rekreasi, sehingga demikian besar dana digelontorkan oleh Pemerintah daerah untuk membangun lokasi pariwisata alam tersebut. Sementara itu, berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, pemda setempat sangat kurang memperhatikan upaya pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal. Padahal jika ditilik kembali, demikian banyak potensi seni budaya di Kabupaten Wa-

katobi yang bernilai karya seni dan wisata yang dapat dipersembahkan kepada para wisatawan.

c. Kondisi yang tidak jauh berbeda ditemukan di Kabupaten Muna. Di daerah ini, seniman tidak mendapatkan kesempatan untuk berinovasi di bidang seni. Bahkan keberadaan sanggar-sanggar seni hampir punah. Di Kecamatan Katobu misalnya, hanya terdapat sekitar 5 sanggar seni budaya dan semuanya tidak menjalankan aktivitas didalamnya (mati suri). Saat masih aktif, semua sanggar-sanggar tersebut biasanya memberikan pelatihan kepada para penari.

d. Pekerjaan di bidang seni hanya sebagai sampingan. Di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Muna dan, para seniman memilih pekerjaan utama sebagai nelayan, petani, pedagang bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, para seniman hanya melakukan latihan ketika ada pertunjukan atau diminta (pesanan) oleh masyarakat untuk tampil dalam acara-acara pernikahan, sunatan dan upacara lingkaran hidup lainnya. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Konawe. Para seniman di daerah ini lebih memilih pekerjaan utama sebagai wiraswasta dan PNS. Tidak ada seorang pun seniman yang menjadikan bidang seni sebagai pekerjaan hidup utama. Tentu saja mereka menganggap bahwa bekerja di bidang seni (utama) tidak memiliki masa depan yang cerah. Kondisi tersebut menyebabkan bidang seni budaya menjadi semakin terpinggirkan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata Budaya di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka menjadi penting bagi pemerintah daerah menyokong kalangan seniman melalui pembinaan secara berkelanjutan, termasuk berkaitan dengan pemberian dukungan anggaran pembinaan seni budaya yang dapat dilakukan oleh para pelaku seni dan budaya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga berbagai wujud seni budaya di daerah ini, khususnya pada tiga

wilayah Kabupaten, yakni Wakatobi, Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe, yang dapat menjadi potensi pariwisata berbasis budaya lokal. Beberapa contoh diantaranya seperti: silat *Bangka Mbule-Mbule*, *Posepa'a*, Tari *Balumpa*, dan Tari *Lariangi*; di Kabupaten Konawe ada Tari *Molulo*, Tari *Dinggu*, dan Tarian *Umo'ara* dan di kabupaten Muna ada Tari *Linda*, Tari *Modero*, Tari *Ende-Ende* dan Silat Muna (*Ewa Wuna*).

## 2. Kesiapan Lembaga Seni

Kesiapan lembaga seni dalam memberikan kegiatan pelatihan bidang seni budaya di Sulawesi Tenggara relatif cukup tersedia. Hal tersebut tampak dari banyaknya lembaga seni yang ada di lokasi penelitian. Di Kabupaten Wakatobi sebagian besar warga yang ikut latihan di sanggar-sanggar seni budaya adalah mereka yang masih duduk di bangku SLTP dan SMU. Pada usia tersebut dianggap merupakan usia yang paling baik dan cepat menangkap materi yang diajarkan, sehingga pelatih tidak mengalami kesulitan dalam memberikan pelatihan. Selain itu, sanggar-sanggar tersebut juga memiliki anak-anak didik yang terlatih, sehingga mereka biasanya selalu siap apabila ada permintaan untuk tampil diberbagai pertunjukan atau pertunjukan seni budaya.

Permasalahan utama tidak jauh berbeda dengan keluhan para seniman sebagaimana telah dipaparkan di atas. Sanggar seni budaya di tiga lokasi penelitian, umumnya menunjukkan geliat aktivitas hanya ketika menjelang pelaksanaan pertunjukan atau pertunjukan saja baik yang digelar oleh Pemerintah, maupun oleh swasta. Setelah kegiatan berlalu, sanggar seni budaya relative tidak dapat menjalankan kegiatan proses latihan rutin.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ada sokongan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak agar lembaga-lembaga seni tersebut tetap eksis di masyarakat meski tidak ada pertunjukan. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan maupun pem-

berian bantuan dana serta peralatan seni budaya.

Umumnya peralatan atau perlengkapan diupayakan sendiri oleh pemilik sanggar. Beberapa diantaranya pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Namun, untuk mendapatkan bantuan tersebut sangat selektif dan harus melalui beberapa tahap penilaian termasuk secara faktual. Sah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh sanggar seni untuk memperoleh bantuan tersebut adalah keaktifan dalam berbagai kegiatan seni budaya serta minim alat dan perlengkapan.

Namun demikian, pada masa kini, sebahagian besar sanggar seni di tiga wilayah kabupaten (lokasi penelitian) mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap eksistensi mereka mempertahankan dan mengembangkan seni budaya lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun bantuan itu ada dari pemerintah, tetapi hanya sebahagian kecil sanggar seni saja yang mendapatkan bantuan, sedangkan sanggar lainnya belum ada.

## 3. Kesiapan Dinas Pariwisata

Dinas pariwisata merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di daerah. Lembaga inilah yang dapat menentukan maju dan mundurnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu aset daerah yang banyak mendatangkan devisa untuk pembangunan. Misalnya Kabupaten Wakatobi yang merupakan ikon pariwisata di Sulawesi Tenggara dengan berbagai upaya dilakukan upaya untuk menggairahkan sektor pariwisata guna mendapatkan pundi-pundi devisa untuk membangun daerahnya.

Untuk data kunjungan wisata di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe di tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung wisata di ketiga lokasi penelitian lebih dido-

minasi oleh wisatawan dalam negeri. Di Kabupaten Wakatobi kunjungan wisata dalam negeri sebanyak 15.668 orang dan pengunjung dari luar negeri hanya 6,712 orang. Di Kabupaten Konawe, jumlah wisatawan nusantara sebanyak 1.892 orang dan wisatawan luar negeri sebanyak 34 orang. Sementara itu, jumlah kunjungan wisata dalam negeri di Kabupaten Muna sebanyak 70.725 orang dan 21 orang wisatawan mancanegara. Hal ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan jumlah pengunjung obyek wisata utamanya pengunjung dari luar negeri atau mancanegara, dengan cara melakukan upaya yang dapat merangsang atau menarik minat para wisatawan untuk menambah kuantitas kunjungan ke destinasi wisata. Salah satu caranya adalah menambahkan sentuhan budaya dalam pengembangan kepariwisataan di daerah Sulawesi Tenggara.

Saat ini, fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengembangan kepariwisataan adalah pariwisata alam, pariwisata rekreasi/pantai, pariwisata sejarah dan pariwisata kuliner. Namun pengembangannya belum terintegrasi satu sama lain. Pemerintah hanya mengembangkan jenis pariwisata tertentu saja sementara jenis pariwisata lainnya belum dikembangkan utamanya pariwisata berbasis budaya lokal.

Begitupun juga dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini mengenai pengelolaan tempat-tempat wisata. Terdapat beberapa tipe pengelolaan obyek wisata, yakni: (1) obyek wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah; (2) obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat, dan (3) Obyek wisata yang dikelola secara bersama-sama, yaitu pemerintah dan masyarakat. Begitupun juga dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan pariwisata, relatif belum berpihak pada pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kepari-

wisataan sebahagian besar untuk pembangunan infrastruktur fisik. Di Kabupaten Muna misalnya, anggaran dipakai untuk membangun menara pandang, gapura atau pintu gerbang masuk, gazebo dan rumah singgah. Sementara di Kabupaten Wakatobi anggaran kepariwisataan banyak dipakai untuk pembangunan resort, perlengkapan diving (*diving board*, *diving room* dan *diving suit*), *speed boat*, dan perlengkapan fasilitas pendukung lainnya. Sementara anggaran pariwisata di Kabupaten Konawe juga untuk pembangunan sarana dan prasarana di areal tempat wisata.

Berbanding terbalik dengan kondisi di atas, anggaran untuk kepentingan pengembangan pariwisata berbasis budaya justru masih sangat terbatas. Anggaran digelontorkan manakala akan ada penyelenggaraan pergelaran atau pertunjukan seni budaya, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta. Para seniman atau sanggar-sanggar seni diberikan bantuan berupa alat perlengkapan seni serta anggaran untuk kepentingan latihan. Pemerintah daerah berdalih, khususnya dinas terkait beralasan bahwa “jika tidak ada pergelaran yang diselenggarakan untuk apa harus diberikan bantuan, kecuali pada saat para seniman dibutuhkan maka anggaran dapat dikucurkan”. Idealnya, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya terhadap para seniman dan sanggar seni budaya harus dilakukan secara berkelanjutan. Implikasi positifnya adalah, bahwa unsur seni budaya dapat terus dilestarikan bahkan dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Upaya pembinaan dan pemberdayaan para pelaku seni dan sanggar seni menjadi mutlak dilakukan dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dana yang cukup dari pemerintah untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal agar pelaku seni dapat berkarya dan berinovasi untuk kepentingan pembangunan daerah. Sehingga pembangunan di bidang



seni budaya dapat terwujud. Kondisi pelaku seni budaya di Sulawesi tenggara yang termarginalkan sebagaimana yang dipaparkan di atas, tak pelak lagi dianggap sebagai penyebab banyak pekerja seni budaya di daerah ini tidak dapat bertahan, karena seakan-akan keberadaan mereka tidak memiliki arti apa-apa. Bahkan untuk mengembangkan karya seni, para seniman harus mencari pendanaan untuk membiayai sanggar seninya dan berbagai keperluan lainnya terkait dengan mengembangkan dirinya.

Selain itu, penyediaan sarana pertunjukan seni di daerah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah setempat juga tampaknya belum optimal. Berdasarkan pengamatan penelitian bahwa tempat khusus untuk dijadikan berbagai pertunjukan seni belum terkoordinir dengan baik. Di berbagai daerah khususnya di 3 lokasi penelitian hanya Kabupaten Wakatobi yang mempunyai taman budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mempersiapkan perangkat penunjang pengembangan pariwisata berbasis budaya berupa prasarana taman budaya. Padahal, Wakatobi sebagai ikon pariwisata budaya juga belum secara optimal memanfaatkan taman budaya sebagai pusat pariwisata budaya daerah. Sejatinya, wadah ini menjadi sangat penting peranannya sebagai media pementasan karya-karya seni dan sekaligus sebagai tempat berinovasi bagi para seniman.

Di sisi lain, wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata, khususnya para penikmat pariwisata budaya biasanya selalu mencari pusat budaya daerah. Namun sayangnya, pusat budaya daerah yang dibangun oleh pemerintah umumnya hanya berisikan benda-benda purbakala dan benda-benda budaya lainnya. Hampir tidak ada kreasi dan inovasi yang mampu dilakukan oleh instansi terkait untuk menggairahkan semangat berkarya di bidang seni budaya melalui media pusat budaya tersebut.

Dengan berkaca pada uraian di atas, maka diperlukan kesiapan pemerintah dae-

rah yang sigap melihat peluang pengembangan destinasi wisata budaya sebagai potensi yang besar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku seni di daerah, menyokong mereka dengan anggaran yang berkelanjutan, serta membangun prasarana pusat kebudayaan yang dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku seni, termasuk sanggar seni budaya untuk menggelar pertunjukan serta melakukan pelatihan dan pembinaan seni budaya kepada masyarakat. Sehingga di masa mendatang akan memberikan sumbangsih bagi pendapatan daerah dan mengerakkan roda ekonomi melalui kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

#### **4. Kesiapan Penunjang Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal**

Dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal harus pula memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di daerah sehingga para wisatawan merasa nyaman dalam melakukan perjalanan wisata. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya lokal adalah sebagai berikut: kondisi keamanan, kondisi infrastruktur, yang meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur penerangan, jaringan telekomunikasi, panduan dan pemandu perjalanan wisata. Selanjutnya, kesiapan masyarakat setempat dalam menerima wisatawan dan kesiapan lembaga keuangan serta promosi wisata.

##### **a. Kondisi Keamanan**

Sektor pariwisata dapat berjalan dengan lancar apabila kondisi keamanan di daerah, khususnya di sekitar destinasi wisata budaya dalam keadaan yang kondusif. Karena semenarik apapun destinasi wisata yang dimiliki daerah jika tidak didukung dengan keamanan, dapat dipastikan destinasi tersebut menjadi kurang diminati oleh para wisatawan. Secara mutlak, wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata akan memastikan dirinya aman dari segala gang-

guan yang mengancamnya selama berada di tempat tersebut.

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan dan menikmati sesuatu setelah bekerja di daerah asalnya dalam kurung waktu tertentu dan menetap sementara di daerah yang ditujunya. Para wisatawan dapat berlama-lama di daerah tujuan untuk mendapatkan suasana baru, inspirasi dan ide-ide baru setelah menjunjungi tempat-tempat tertentu dan menikmati suguhan budaya lokal yang dikunjunginya. Untuk itu, daerah yang dituju dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk kenyamanan dan keamanan para pengunjung.

Untuk itu, daerah yang dituju yang menyediakan berbagai destinasi wisata harus menciptakan suasana yang kondusif untuk kenyamanan dan keamanan para pengunjung yang ada di tempat itu. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2013-2015 yang melakukan pemetaan konflik sosial di Sulawesi Tenggara menemukan bahwa penyebab konflik sosial dan potensi konflik sosial dimasa mendatang sangat bervariasi. Di Kabupaten Muna misalnya, pernah terjadi konflik sosial pada tahun antara 2011-2012. Konflik tersebut banyak menelan korban baik korban harta, maupun nyawa manusia. Penyebab konflik sosial umumnya disebabkan oleh kebiasaan mengkosumsi minum-minuman keras oleh masyarakat setempat, kesalahpahaman antar pemuda yang memicu terjadinya kekerasan masal. Selain itu juga disebabkan oleh berbagai aksi kekerasan yang direncanakan, konflik kepentingan, minimnya lapangan pekerjaan, serta konflik antar komunitas.

Konflik dan potensinya juga juga teridentifikasi di Kabupaten Wakatobi. Berbagai gesekan sosial atau konflik sosial yang pernah terjadi di daerah ini antara lain: perebutan tanah adat, perkelahian antar pemuda, konflik ganti rugi tanah dengan pe-

merintah setempat, konflik tapal batas wilayah antar orang-perorang, antara warga antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi maupun antar negara, konflik sekolah kelautan internasional antara tokoh adat dengan pemerintah setempat, konflik larangan mengambil air bersih antara Desa Posalu dan Desa Tindoi Timur.

Demikian pula di Kabupaten Konawe. Di daerah ini, konflik dan potensinya yang paling menonjol adalah: (1) perebutan lahan yang dipicu oleh sumberdaya alam yang terdapat pada lahan yang dikuasai oleh PT. CAS yang bergerak dibidang pertambangan dengan masyarakat setempat; (2) ketidakjelasan status lahan dan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat, karena banyaknya tenaga kerja dari luar yang dipekerjakan, sementara warga setempat kurang dilibatkan sebagai tenaga kerja; dan (3) ketidakjelasan status lahan antara masyarakat setempat dengan perusahaan kelapa sawit yaitu PT Sinar Alam Karya Semesta.

## **b. Ketersediaan Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur sangat dibutuhkan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan, karena tanpa ditopang oleh kondisi infrastruktur yang baik maka pelaksanaan pembangunan pariwisata menjadi terhambat. Pada bagian ini dapat dijelaskan mengenai ketersediaan infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi, kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan, kesiapan lembaga keuangan dan kesiapan perhotelan.

### **1) Infrastruktur jalan**

Salah satu menunjang pelaksanaan pariwisata adalah ketersediaan infrastruktur jalan yang baik. Karena ini berhubungan dengan kenyamanan wisatawan ketika mengunjungi suatu tempat wisata. Sebenarnya kondisi jalan yang baik itu bukan saja dapat menunjang sektor pariwisata, tetapi juga dapat menunjang sektor-sektor lainnya agar dapat berjalan

lancar. Oleh karena itu, beberapa daerah-daerah di Sulawesi Tenggara sangat memperhatikan kondisi infrastruktur jalan agar selalu dalam kondisi yang baik

Berdasarkan hasil penelitian di tiga kabupaten mengindikasikan bahwa kondisi jalan sebagai penunjang pariwisata cukup baik. Walaupun di beberapa bagian jalan kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Di Kabupaten Muna misalnya, kondisi jalan dalam kota dalam kondisi baik, tapi ada beberapa bagian dalam kondisi rusak ringan. Apalagi jalan menuju tempat wisata sangat sempit dan tidak terawat. Misalnya, jalan menuju Napabale walaupun kondisi jalannya dalam kondisi baik, namun di beberapa bagian jalan rusak ringan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan saat mengunjungi berbagai destinasi tersebut.

Untuk kepentingan pengembangan pariwisata maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di daerah, maka menjadi tugas pemerintah daerah dan masyarakat masyarakat di sekitar tempat wisata, untuk menyediakan infrastruktur jalan yang memadai sekaligus melakukan perawatan atas fasilitas tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyediakan dana perawatan jalan menuju tempat-tempat lokasi wisata agar jalan dapat terpelihara dengan baik. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi dengan turut menjaga dan merawat fasilitas jalan khususnya kebersihan di pinggir bahu jalan yang biasanya selalu telah ditumbuhi oleh rerumputan liar, yang dapat mempersempit dan bahkan menutupi bahu jalan.

Penyediaan infrastruktur jalan, tentu saja bukan merupakan domain tugas utama dari Dinas Pariwisata, namun demikian fungsi koordinasi harus dijalankan instansi ini dengan berbagai instansi terkait lainnya di Kabupaten Muna untuk menjamin tersedianya infrastruktur jalan yang baik ke berbagai lokasi destinasi wisata di daerah ini. Kondisi infrastruktur jalan yang baik,

tentu saja akan mendukung terwujudnya program Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yakni, peningkatan promosi pariwisata baik berskala nasional maupun internasional.

Kondisi yang sama juga ditemukan di Kabupaten Wakatobi yang merupakan ikon pariwisata di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kondisi jalan yang ada di dalam kota dan menuju tempat-tempat wisata dalam kondisi yang baik. Kecuali itu, di beberapa tempat misalnya jalan menuju *Sombu* yang merupakan salah satu destinasi wisata *diving* dalam proses perbaikan jalan oleh pemerintah setempat, termasuk di beberapa tempat lainnya. Namun demikian, di beberapa tempat kondisi ruas jalan dalam keadaan rusak ringan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Sementara itu kondisi jalan di Kabupaten Konawe dalam keadaan baik. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa kondisi jalan dalam kota cukup baik, begitupun juga jalan antar kecamatan dan kabupaten cukup baik. Kendati demikian, beberapa ruas jalan di daerah ini masih dalam kondisi yang kurang baik, termasuk ruas jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah terpencil seperti yang menghubungkan jalan dengan Kecamatan Lato-ma, Kecamatan Uesi dan daerah terpencil lainnya kondisi jalannya rusak berat.

Jalan menuju lokasi destinasi wisata relatif cukup baik, meski demikian masih ada pula ruas jalan yang relatif tidak layak dan masih perlu diperbaiki. Misalnya, jalan menuju lokasi wisata Batu Gong dan wisata Pantai Toronipa dalam kondisi yang rusak. Obyek Wisata Pantai Toronipa merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan khususnya yang berasal dari Kota Kendari, karena tempatnya yang dekat dan mudah dijangkau. Oleh karena itu, perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah setempat, mengingat tempat ini banyak diminati oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.



## **2) Jaringan Telekomunikasi**

Jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang dapat menjembatani penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain yang menggunakan telepon seluler. Tersedianya jaringan telekomunikasi pada berbagai destinasi wisata juga merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan pariwisata di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di tiga wilayah kabupaten di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna dan Kabupaten Wakatobi telah tersedia jaringan telekomunikasi utamanya jaringan seluler. Hanya sebagian kecil saja daerah, khususnya daerah yang jauh ke pelosok desa yang belum dapat terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi seluler tersebut.

Secara spesifik, di Kabupaten Muna ada beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan seluler, misalnya sebagian wilayah Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Bone dan lokasi-lokasi terpencil lainnya. Namun demikian, secara umum ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler di berbagai tempat destinasi wisata telah cukup optimal. Hal ini tentu saja akan memberikan nilai tambah pada berbagai destinasi wisata di ketiga daerah kabupaten tersebut.

Kondisi spesifik berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi seluler juga teridentifikasi di dua daerah kabupaten lainnya. Di Kabupaten Konawe, ada wilayah yang dapat mengakses jaringan seluler dan ada wilayah yang belum sama sekali terkoneksi dengan jaringan seluler tersebut. Semua wilayah di dalam kota di daerah ini telah dapat terkoneksi ke jaringan telekomunikasi seluler. Dengan demikian wisatawan yang berada di wilayah ini, sudah dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi tersebut dengan lancar, tanpa menemui hambatan. Sementara itu, wilayah yang belum memiliki jaringan seluler adalah daerah-daerah terpencil seperti di Kecamatan Latoma, Kecamatan Uesi dan

kecamatan yang terpencil lainnya. Beberapa destinasi wisata alam (pantai) di daerah ini telah terkoneksi maksimal dengan jaringan telekomunikasi seluler, seperti Pantai Batu Gong dan Pantai Toronipa dapat mengakses jaringan seluler dengan baik.

### **1) Kesiapan Masyarakat Setempat dalam Menerima Wisatawan**

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal. Karena pemertahanan seni budaya lokal juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat jualah yang paling tahu mengenai nilai-nilai budaya serta makna dibalik budaya yang mereka miliki. Sehingga sejatinya, masyarakat juga dapat berperan sebagai sumber informasi tentang kearifan lokal yang ditampilkan dihadapan wisatawan. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan sebagai pemandu wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Sulawesi Tenggara.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan para pemandu wisata dari kalangan masyarakat setempat yang menguasai makna budaya sudah sangat sukar. Generasi muda kurang memahami budayanya. kecuali orang-orang tua yang kebetulan masih mengetahui nilai dan makna budaya yang ada. Namun keberadaan mereka sudah sangat sedikit apalagi jika melibatkan mereka untuk memandu para wisatawan. Tentu saja hal tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin, karena dari segi fisik dan kesehatan kalangan orang tua ini sudah tidak memungkinkan lagi. Di sisi lain, kalangan pemuda di daerah kurang perhatian/peduli pada budaya lokal mereka sendiri, serta enggan pula untuk belajar tentang seni dan budaya. Mereka cenderung disibukkan dengan berbagai pergaulan yang kekinian dan menganggap bahwa mempelajari budaya adalah sesuatu hal yang sudah kuno.

Untuk menghindari terjadinya degradasi budaya dikalangan generasi muda, maka tentu saja pemerintah dan berbagai

pihak terkait perlu melakukan pola pembinaan dan pemberdayaan bagi generasi muda untuk kembali melirik dan mempelajari budaya mereka masing-masing. Karena dalam konteks pengembangan pariwisata budaya, keterlibatan masyarakat, khususnya kaum muda menjadi hal yang sangat penting. Beberapa manfaat yang positif dapat diperoleh dari upaya tersebut, yakni:

- a) Pemertahanan budaya secara berkelanjutan hingga ke kalangan muda;
- b) Kaum muda memahami budaya serta makna dan nilai yang menyertainya secara menyeluruh;
- c) Kaum muda selanjutnya dapat ikut serta dalam proses pengelolaan obyek wisata baik sebagai pemandu wisata, maupun sebagai generasi muda pencinta budaya local;
- d) Kaum muda dapat berperan membantu wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk memahami mereka tentang budaya beserta makna dan nilainya, sehingga memberikan nilai tambah bagi destinasi wisata tersebut.

## 2) Kesiapan Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan wadah yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat, baik itu untuk keperluan pengamanan barang-barang berharga maupun membantu untuk masyarakat untuk memperoleh bantuan modal usaha. Berbagai macam barang berharga dapat disimpan di bank yaitu di *safe deposit box* seperti emas dan surat-surat berharga. Ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan keamanan dari barang berharga yang dimilikinya. Begitupun juga jika masyarakat ingin mendapatkan bantuan modal untuk pengembangan usaha atau untuk kebutuhan lainnya, maka lembaga keuangan merupakan salah satu alternatif yang dapat membantu untuk mendapatkan modal usaha yang diinginkannya, dengan jaminan yang telah ditentukan oleh pihak perbankan. Keberadaan bank di daerah juga sangat membantu masyarakat yang sedang

melakukan perjalanan jauh. Mereka tidak lagi perlu membawa uang kontan untuk kebutuhan perjalanan dalam jumlah yang banyak.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, maka keberadaan Bank yang dilengkapi dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), khususnya di sekitar lokasi wisata menjadi sangat penting. Para wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata sangat memerlukan bank untuk kebutuhan berbagai jenis transaksi keuangan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan berbagai bank untuk membuka cabang di daerah kabupaten serta menyediakan Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic Teller Machine* (ATM), sehingga dapat pula dimanfaatkan oleh wisatawan yang membutuhkan dana *cash* atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Saat ini beberapa Kantor Cabang Bank BUMN dan Swasta telah tersedia diseluruh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, meski keberadaannya belum merata. Umumnya, Bank hanya terdapat di pusat-pusat kota. Sangat sedikit berada di daerah pelosok.

## 3) Kesiapan Perhotelan

Hotel adalah tempat menginap atau tempat untuk beristirahat bagi mereka yang bepergian jauh. Dengan keberadaan hotel di daerah, membuat wisatawan tidak ragu untuk mengunjungi suatu tempat. Jika wisatawan berkunjung ke suatu destinasi wisata lebih dari satu hari, maka pilihan menginap di hotel biasanya dijadikan pilihan utama. Ketersediaan fasilitas hotel di sekitar destinasi wisata menjadi unsur yang sangat mendukung upaya pengembangan destinasi wisata di daerah. Berkaitan dengan fungsi dasar hotel, yakni melayani kebutuhan masyarakat khususnya wisatawan yang ingin beristirahat, maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

- a) Hotel harus memenuhi syarat standarisasi sesuai dengan kebutuhan wisata-

wan. Standarisasi berkaitan pula dengan fasilitas dan tingkat kenyamanan yang mampu disediakan oleh hotel. Wisatawan umumnya mengutamakan Kenyamanan ketika berada di suatu tempat. Jika hotel yang dihuni tidak, maka mereka nyaman akan mencari tempat lain yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi dirinya. Hal ini menjadi sangat penting, khususnya bagi wisatawan yang mengunjungi suatu tempat dengan tujuan untuk refreking dan mendapatkan kepuasan.

- b) Pengelola hotel harus memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan. Sehingga memberikan kepuasan bagi mereka dan kembali lagi pada kesempatan kunjungan wisata berikutnya.

Secara kuantitatif, jumlah hotel/-penginapan/wisma yang terbanyak adalah di Kabupaten Wakatobi yakni 47 unit hotel. Jumlah itu tersebar di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Wangi-wangi selatan sebanyak 22 unit, kecamatan Wangi-wangi sebanyak 11 unit, Kecamatan Tomia 7 unit dan Kecamatan Tomia Timur sebanyak 1 unit. Selanjutnya, di Kabupaten Muna terdapat 22 hotel yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Katobu 19 unit, Kecamatan Batalaiworu 2 unit dan di Kecamatan Tongkuno 1 unit. Sementara itu, di kabupaten Konawe hanya terdapat sekitar 11 unit hotel yang tersebar di beberapa kecamatan.

#### **D. PENUTUP**

Gambaran mengenai kesiapan *stakeholders* dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Para seniman telah melakukan berbagai kegiatan pelatihan seni melalui sanggar-sanggar seni yang melibatkan generasi muda. Walaupun para pelaku seni ini memiliki keterbatasan anggaran (dana) untuk membiayai operasional sanggar seninya, tetapi mereka tetap berkarya demi lestari seni dan budaya di wilayahnya masing-masing.

2. Dinas Pariwisata belum memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para seniman atau pada pelaku budaya terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal. Salah satu kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata di tiga wilayah kabupaten yang menjadi lokasi penelitian ini adalah masalah anggaran yang masih sangat terbatas.
3. Ketersediaan infrakstruktur jalan di pelosok-pelosok desa di tiga wilayah lokasi sampel penelitian belum memadai, sehingga dibutuhkan penanganan khusus dari pemerintah. Ketersediaan jaringan listrik juga belum memadai, di beberapa wilayah pedesaan yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal jaringan listrik belum ada. Kendatipun demikian, jaringan telekomunikasi telah tersedia dan dapat diakses dengan baik Namun demikian, khusus di wilayah perdesaan yang terpencil belum dapat merasakan manfaat komunikasi melalui karingan yang disediakan oleh operator seluler. Hal ini membutuhkan penanganan segera, khususnya jika wilayah tersebut memiliki obyek wisata yang sangat diminati oleh wisatawan dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
4. Masyarakat setempat utamanya generasi muda telah banyak melupakan budayanya. Kondisi tersebut akan menyulitkan proses pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal di Sulawesi Tenggara. Untuk menghindari terjadinya degradasi budaya dikalangan generasi muda, maka tentu saja pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu melakukan pola pembinaan dan pemberdayaan bagi generasi muda untuk kembali melirik dan mempelajari budaya mereka masing-masing. Karena dalam konteks pengembangan pariwisata budaya, keterlibatan masyarakat, khususnya kaum muda menjadi hal yang sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benard, Russell, H. 1994. *Research Methods in Anthropology*. London-New Delhi: SAGE Publication.
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. 2013. *Pemetaan Bencana Sosial di Sulawesi Tenggara*. Kendari.
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. 2014. *Pemetaan Bencana Sosial di Sulawesi Tenggara*. Kendari.
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. 2015. *Pemetaan Bencana Sosial di Sulawesi Tenggara*. Kendari.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pendit, S. Nyoman. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syahril, Ramadhan. 2017. *Kafe Tenda di Kota Kendari*. Skripsi Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Vredenburg, J. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.